

**IMPLEMENTASI *AL-MUSAQAH* PADA PETANI SAWIT DI KECAMATAN  
TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)



**KAMSIAH RAMBE**

**NIM. 10825003858**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2012**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yaitu berupa pemilik kebun memberikan kebunnya yang sudah ditanami kepada pekerja kebun untuk dirawat atas dasar kepercayaan tanpa pengawasan langsung dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem *al-Musaqah* dan implementasinya pada petani sawit, bagaimana pandangan masyarakat terhadap kerjasama bagi *al-Musaqah* serta tinjauan ekonomi Islam terhadap kerjasama bagi hasil tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yaitu petani sawit yang menggunakan sistem bagi hasil *al-Musaqah* dalam perawatan kebun miliknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan *al-Musaqah* pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap bagi hasil *al-Musaqah* dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi *al-Musaqah*.

Subjek penelitian ini adalah pemilik kebun sawit dan pekerja kebun sawit, objek dalam penelitian ini adalah implementasi *al-Musaqah* di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik kebun dan pekerja kebun sawit dengan jumlah pemilik kebun sawit yaitu 3.810 orang. Dikarenakan jumlah petani sawit yang melakukan kerjasama bagi hasil *al-Musaqah* tidak terdata maka penulis mengambil sampel pemilik kebun 24 orang dan pekerja kebun sawit 24 orang dengan menggunakan metode *Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak.

Data penelitian diperoleh dari semua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden yaitu pemilik dan pekerja kebun

sawit, dengan cara melakukan wawancara dan menyebarkan angket. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kitab-kitab dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, deduktif dan deskriptif.

Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan mengenai implementasi *al-Musaqah* penulis berpendapat bahwa kerjasama bagi hasil *al-Musaqah* di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ini mempunyai tujuan yang baik dimasa yang akan datang Karena dapat meningkatkan perekonomian petani sawit dan menghindari keterlataran lahan, hanya saja masih terdapat unsur-unsur penyimpangan yaitu berupa kecurangan dalam pembagian hasil yang dilakukan oleh pekerja kebun, dan pemutusan kerjasama secara sepihak oleh pemilik kebun sawit, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan syari'at Islam yang sebenarnya jadi perlu dibenarkan mengenai pelaksanaan kerjasama ini agar sesuai dengan syariat Islam.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SKRIPSI

PERSEEMBAHAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR .....iii

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR TABEL.....vii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan geografis .....	13
B. Keadaan demografis .....	15
C. Pendidikan dan keagamaan .....	17
D. Keadaan sosial ekonomi .....	20

### BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG *AL-MUSAQAH*

A. Pengertian <i>al-Musaqah</i> .....	23
B. Dasar hukum <i>al-Musaqah</i> .....	25
C. Rukun, objek dan syarat-syarat <i>al-Musaqah</i> .....	27
D. Kewajiban <i>Musaqi</i> (pekerja) .....	30
E. Berakhirnya Akad <i>Musaqah</i> . .....	31

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi <i>al-Musaqah</i> pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar .....	34
B. Pandangan masyarakat terhadap kerjasama bagi hasil <i>al-Musaqah</i> .....	37
C. Tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi <i>al-Musaqah</i> pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar .....	49

#### BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

#### RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1. Tanggapan responden tentang keinginan kerjasama.....	39
Tabel 2. Tanggapan responden tentang penjelasan sebelum kerjasama .....	40
Tabel 3. Tanggapan responden tentang penjelasan sifat-sifat kebun.....	41
Tabel 4. Tanggapan responden tentang yang berhak menentukan batas waktu kerjasama .....	42
Tabel 5. Tanggapan responden tentang waktu pembagian hasil.....	42
Tabel 6. Tanggapan responden tentang setiap berapa kali dilakukan perawatan .....	43
Tabel 7. Tanggapan responden tentang adanya keuntungan dalam kerjasama .....	44
Tabel 8. Tanggapan responden tentang terbantunya perekonomian petani sawit .....	45
Tabel 9. Tanggapan responden tentang terjadinya penyimpangan selama kerjasama .....	45
Tabel 10. Tanggapan responden tentang hal tidak bisa melaksanakan kewajiban .....	46
Tabel 11. Tanggapan responden tentang terjadinya perselisihan dalam pembagian hasil .....	47
Tabel 12. Tanggapan responden terhadap pembagian hasil disebutkan ketika akad.....	48

Tabel 13. Tanggapan responden tentang pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan. ....	49
Tabel 14. Tanggapan responden tentang alasan dilakukannya kerjasama. ....	50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Telah diketahui bahwa hukum Islam mengatur dua macam bentuk hubungan yang mana keduanya saling berkaitan, yaitu: hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan Allah dalam arti khusus yaitu ibadah, sedangkan hubungan manusia dengan manusia serta lingkungan alam sekitarnya yaitu disebut dengan *mu'amalah* atau kemasyarakatan.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindar dari kehidupan bermasyarakat, tidak bisa hidup sendirian, manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya dan dukung mendukung dalam memperoleh kemajuannya, oleh sebab itu manusia tidak dapat menghindar dari kerjasama antara satu dengan yang lainnya, bila ingin mencapai kemajuan dan kebahagiaan dalam hidupnya dan siapa yang menghindar dari kenyataan berarti akan membawa dirinya kepada kemunduran dan kemelaratannya sebagaimana digambarkan didalam QS. Ali Imran (3) : 112,

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ...

*Artinya: “Mereka ditimpah kehinaan dimana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan berhubungan dengan sesama manusia”.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h.65.

Berdasarkan dalil di atas Allah sangat menegaskan kepada hamba-hamba-Nya yang tidak mentaati perintah-Nya dan tidak berhubungan atau bermu'amalah secara baik dengan sesama manusia maka kehinaanlah yang akan diperolehnya.

Manusia adalah khalifah di muka bumi, dan Allah telah menentukan semesta ini untuk kepentingan manusia. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain dengan meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lainnya tidak bisa dielakkan.<sup>2</sup> Manusia sebagai Khalifah juga telah diwajibkan dan berhak mengelolah sekaligus memanfaatkan alam semesta untuk kelangsungan hidup dan kehidupan lingkungannya.

Tingkah laku manusia khususnya tingkah laku ekonominya harus sesuai dengan ketentuan Allah atau sesuai dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Tingkah laku atau perilaku muslim terletak pada kerjasama, bukan menonjolkan kompetisi, karena bila yang terakhir yang diutamakan akan membuahkan ketidakadilan dan ketidakjujuran, serta akan merusak tatanan moral yang amat didambakan oleh manusia yang beriman.<sup>3</sup>

Aspek kerjasama dan perhubungan manusia yang digariskan dalam al-Quran dan Sunnah sangatlah banyak dan kemudian dikembangkan oleh para ulama adalah masalah bagi hasil atau dalam istilah fiqh disebut *al-musaqah*.

---

<sup>2</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-kausar, 2001), Cet 1, h. 10.

<sup>3</sup> Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Pengembangan*, (Riau: Suska Press, 2008), h.6.

Sebagai salah satu aspek kerjasama perkebunan yaitu mereka mempunyai modal dan perkebunan, tetapi tidak bisa menjalankan usahanya dengan cara yang produktif karena pemilik kebun tidak mampu untuk mengelola sendiri perkebunan yang mereka miliki, yang menjadi alasan yaitu kurangnya waktu mereka dikarenakan adanya usaha yang lain, tempat tinggal yang jauh dari perkebunan dan tidak mampu lagi untuk mengurus kebun mereka karena faktor kesehatan dan usia yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja.

Perkebunan mereka bisa berkembang secara produktif dengan penghasilan yang baik yaitu apabila mereka mempekerjakan orang lain yang memiliki kemampuan di bidang tersebut dan tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dengan adanya kerjasama antara pemilik perkebunan dengan pengelola sehingga pengelola yang tidak memiliki perkebunan akan sangat terbantu karena perkebunannya telah ada yang mengelolakan.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *Fiqh 'ala mazdhabih al-arba'ah* disebutkan yang dimaksud dengan *al-musaqah* menurut bahasa adalah: memperkerjakan seseorang pada kebun kurma atau anggur dan sebagainya untuk memelihara dan sebagai imbalannya mendapat bagian dari hasilnya. Pengertian ini menurut beliau hampir sama dengan pengertian syara' ditambah dengan kata-kata syarat tertentu sebagai ketentuan syahnya suatu akad. Secara tersendiri Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan pengertian *al-musaqah* menurut syara' adalah suatu akad yang dilakukan untuk pemeliharaan

kurma dan tumbuh-tumbuhan lainnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dapatlah diambil pengertian bahwa *al-musaqah* adalah suatu kerjasama antara pemilik pohon dengan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaannya.

Pembolehan *al-musaqah* di dalam ketentuan hukum Islam karena banyak yang membutuhkannya, dan didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga telah dilaksanakan oleh para sahabat. Dalam sebuah Hadis Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada penduduk khaibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.<sup>5</sup>

Agar pelaksanaan bagi hasil *al-musaqah* dapat berjalan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, maka oleh para ulama terdahulu ditetapkanlah beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku perikatan. Apabila syarat ini tidak dapat dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal (*fasakh*).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqh 'Ala Mazahibi Al-Arba'ah* Terj: H. Moh Zuhri, dkk (Semarang: Asy-Syafa' 1994), Jilid 4, hal. 21

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2007) Cet ke 40, h. 301.

<sup>6</sup> Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj: Mughaidin Mughayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), Cet.5, h.295.

*Musaqah* memiliki dua rukun yaitu ijab dan qabul, sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perikatan *al-musaqah* ini oleh ulama fiqh ditentukan sebagai berikut:

1. Bahwa pohon yang akan dilakukan bagi hasil *al-musaqah* itu harus diketahui dengan penglihatan atau sifat yang tidak berbeda dengannya, karena akad terhadap sesuatu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah.
2. Bahwa masa *musaqah* diketahui karena ia merupakan akad lazim (keharusan) sehingga tidak ada unsur *gharar* (penipuan) di dalamnya.
3. Hendaknya akad *musaqah* dilakukan sebelum tampak buahnya, karena dalam kondisi seperti ini pohon perlu penggarapan.
4. Hendaknya *musaqi* (penggarap) mendapatkan bagian tertentu dari hasilnya seperti setengah atau sepertiga bagian.<sup>7</sup>

Rukun dan syarat di atas menjelaskan bahwa kerjasama dengan sistem bagi hasil *al-musaqah* diakui keberadaannya dalam agama Islam dan bila dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya tentu akan dapat membantu pihak yang melaksanakannya, baik itu pemilik kebun sawit ataupun pekerja kebun sawit .

Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar pelaksanaan kerjasama bagi hasil *al-musaqah* kebun kelapa sawit seperti yang dimaksudkan pada tulisan ini adalah pemilik kebun memberikan kebun kelapa sawitnya yang sudah ditanami kepada pekerja untuk dirawat atau dipelihara sampai

---

<sup>7</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* Terj: Abdul Majid, dkk (Kartasura: PT.Aqwam Media Profetika 2010), h. 365-366.

menghasilkan buah dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.<sup>8</sup>

Adapun dalam pembagian hasil dari kerjasama *al-musaqah* yang diperoleh dari hasil kebun sawit tersebut tidaklah berupa jumlah buah yang diberikan kepada pekerja dari hasil yang didapatkan akan tetapi dalam bentuk uang yang diperoleh dari hasil penjualan buah sawit tersebut sesuai kesepakatan. Namun dalam pembagian hasil dari penjualan buah sawit tersebut sering terjadi perselisihan antara pemilik kebun dan pekerja kebun sawit.

Pelaksanaan bagi hasil *al-musaqah* pada kebun kelapa sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ini ada yang melakukannya dengan menentukan batas waktu dan ada pula yang tidak menentukan batas waktunya. Akibatnya, akan memungkinkan sewaktu-waktu dengan alasan tertentu sipemilik kebun dapat saja mengambil kebun kelapa sawitnya yang sudah diserahkan kepada pekerja kebun sawit, Hal ini tentunya merugikan pekerja kebun sawit dalam hal perekonomiannya, karena semestinya pekerja kebun sawit masih bekerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan perawatan yang baik, akan tetapi harus mengakhiri kerjasama tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan gejala diatas, penulis tertarik dengan permasalahan yang terjadi dan ingin mengetahui lebih jauh lagi dengan mengadakan penelitian secara ilmiah yang berjudul: **“Implementasi *al-musaqah* pada Petani Sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**

---

<sup>8</sup> Wahyudi, Ketua Kelompok Tani, *Wawancara*, Tapung Hilir 30 juni 2012

<sup>9</sup> Muntaji, Ketua Kelompok Tani, *Wawancara*, Tapung Hilir 30 juni 2012

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan ini yakni yang melakukan **Implementasi *al-musaqah* pada Petani Sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam.**

## **C. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah dalam hal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *al-musaqah* pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi *al-musaqah* pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui implementasi *al-Musaqah* pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
  - b. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi *al-musaqah* pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

## 2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang implementasi *al-musaqah* pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi *al-musaqah* pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian daerah perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dikarenakan pada saat sekarang sudah jarang ditemukan masyarakat yang melakukan kerjasama pada perkebunan sawit miliknya dengan menggunakan sistem bagi hasil *al-musaqah*, sehingga diharapkan dapat memberikan data-data yang lebih valid tentang kerjasama tersebut, serta lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh penulis.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pemilik kebun dan pekerja kebun sawit, sedangkan yang menjadi objeknya adalah implementasi *al-musaqah* pada Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

### 3. Populasi dan Sampel



Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik kebun sawit dan pekerja kebun sawit yang melakukan kerjasama bagi hasil *al-musaqah* di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dengan jumlah pemilik kebun yaitu 38.810 orang, dari jumlah tersebut petani sawit yang menggunakan *al-musaqah* yaitu pemilik kebun sawit sebanyak 24 orang dan pekerja kebun sawit sebanyak 24 orang, sehingga jumlah populasi petani sawit yang melakukan kerjasama *al-musaqah* yaitu sebanyak 48 orang. Penelitian ini menggunakan teknik *Total Sampling*.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pemilik kebun sawit dan pekerja kebun sawit yang terlibat secara langsung dalam masalah ini.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku bacaan yang mempunyai hubungan dengan masalah ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. *Wawancara*, yaitu penulis melakukan tanya jawab secara langsung terhadap pemilik dan pekerja kebun sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- b. *Observasi*, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan pelaksanaan kerjasama bagi hasil *al-musaqah* serta masalah yang perlu diteliti secara langsung.

- c. *Angket*, yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan seputar penelitian ini kemudian untuk diisi oleh responden yaitu pemilik dan pekerja kebun sawit untuk memperkuat hasil penelitian.

#### 6. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah diperoleh serta membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan kemudian digambarkan dengan kata-kata serta membuat sebuah kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

#### 7. Metode Pembahasan

- a. Deduktif adalah mengungkap data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif adalah mengungkapkan secara mengetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum
- c. Deskriptif adalah mencari data yang khusus menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti.

### **F. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dikemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode analisa data,

metode pembahasan dan Sistematika Penulisan. Dalam bab ini secara umum dibicarakan tentang pandangan Islam dan sistem bagi hasil *al-musaqah* di kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sedangkan gambaran umum lokasi penelitian akan dibahas pada bab II.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah Kecamatan Tapung Hilir, gambaran umum kehidupan petani sawit yang memuat pembahasan tentang goeografis dan demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, serta kehidupan sosial ekonomi petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Untuk teori tentang kerjasama bagi hasil akan dibahas pada bab III.

## **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG *AL-MUSAQAH***

Bab ini membahas tentang pengertian *al-musaqah*, pengertian kerjasama *al-musaqah*, rukun, objek dan syarat-syarat *al-musaqah*, tugas *musaqi* dan berakhirnya akad *al-musaqah* serta perbedaan antara *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *al-musaqah* di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar akan dibahas pada bab IV.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan hasil dan pembahasan mengenai implementasi bagi hasil *al-musaqah* pada Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, perspektif ekonomi Islam terhadap *al-*

*musaqah* dan implementasinya di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, berisikan data-data yang diperoleh dari lapangan serta analisa hasil penelitian.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penelian atau jawaban dari rumusan masalah pada penelitian serta saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Keadaan Geografis**

Kecamatan Tapung Hilir merupakan salah satu Kecamatan dari banyak Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar Riau. Kecamatan Tapung Hilir merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan induk yakni Kecamatan Tapung berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2001, dengan pusat pemerintahan Kecamatan Tapung Hilir di Desa Kota Garo.

Pada mulanya Kecamatan Tapung Hilir ini adalah pemekaran dari Kecamatan Siak Hulu, dikarenakan Kecamatan Siak Hulu terlalu luas maka pada tahun 1995 dilakukan pemekaran menjadi Kecamatan Tapung, setelah menjadi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan juga terlalu luas maka pada tahun 2001 dimekarkan kembali menjadi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hilir, dan Kecamatan Tapung Hulu.

Daerah ini terdiri dari daratan dan sungai, pada daratan di Kecamatan Tapung Hilir ini terdapat hamparan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas dan perkebunan kelapa sawit inilah yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama penduduk kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, selain tanaman sawit terdapat juga tanaman-tanaman lainnya milik warga seperti tanaman padi, cabe, jagung, dan umbi-umbian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sutami, Sekretaris Camat, *Wawancara*, Kantor Camat Tapung Hilir, 29 mei 2012

Adapun pada sungai Tapung tersebut dijadikan tempat untuk mencari ikan, sebagian penduduk menangkap ikan untuk konsumsi sehari-hari namun ada pula yang menjadikannya mata pencaharian.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penghasilan pokok penduduk Kecamatan Tapung Hilir terletak pada perkebunan kelapa sawit, sedangkan berkebun palawija dan nelayan sebagai penghasilan tambahan bagi sebagian penduduk yang bertempat tinggal berdekatan dengan sungai Tapung dan lahan kosong yang terdapat di setiap Desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Propinsi Riau terletak antara 1,01 LU sampai dengan 0,20 LS dan antara 0,40 BT sampai dengan 0,90 BB serta berada pada ketinggian 100 M diatas permukaan laut dengan luas wilayah Kecamatan Tapung Hilir =84.072 Ha.

Secara geografis Kecamatan Tapung Hilir menempati wilayah seluas 84.072 Hektar, dengan bentuk topografi tanah berbentuk daratan. Sedangkan batas-batas daerah Kecamatan Tapung Hilir sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kota Pekanbaru
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Tapung Hulu
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung.<sup>2</sup>

Kecamatan Tapung Hilir memiliki jenis tanah yaitu *Gley Humus* (gambut), podsolit merah kuning (PMK) dan Latosol. Tanah gambut beriklim

---

<sup>2</sup> Dokumentasi dari Kantor Camat Tapung Hilir

panas, tanah-tanahnya penuh dengan areal perkebunan masyarakat yang berisikan kelapa sawit dan lain sebagainya yang dikelola oleh masyarakat Kecamatan Tapung Hilir dan para pendatang.

## B. Keadaan Demografis

Pada Kecamatan Tapung Hilir terdapat 16 Desa, dengan luas wilayah dan luas lahan perkebunan sawit seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

**Tabel II.1**  
**Jumlah Desa di Kecamatan Tapung Hilir**  
**Menurut Luas Wilayah dan Perkebunan Sawit**  
**Tahun 2011/2012**

No	Nama Desa	Luas Wilayah/Ha	Luas Perkebunan Sawit/Ha
1	Kota Garo	36.000,75	35.005
2	Kota bangun	2.843	1.568
3	Cinta damai	1.587	1.250
4	Beringin lestari	647	450
5	Sekijang	16.000	14.020
6	Kota aman	12.000	7.002
7	Tapung makmur	1.700	1.150
8	Tapung lestari	910	400
9	Suka maju	1.560	1.154
10	Kota baru	1.146,50	725
11	Tanah tinggi	1.776,5	1.050
12	Kijang jaya	1.573	1.102
13	Tandan sari	1.500	1.251
14	Gerbang sari	1.500	1.205
15	Kijang makmur	1.826	1.502
16	Tebing lestari	1.502	615
Jumlah		84.071,75 Ha	69.449 Ha

*Sumber:* Data dari Kantor Camat Tapung Hilir Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah Desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir yaitu sebanyak 16 desa, dengan luas wilayah sebesar 84.072 Ha serta luas perkebunan sawit sebesar 69.449 Ha, dengan

membandingkan antara luas wilayah dan luas perkebunan maka dapat diketahui bahwa luas wilayah untuk perkebunan sawit jauh lebih luas dari pada luas wilayah pemukiman penduduk.

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2012, penduduk Kecamatan Tapung Hilir berjumlah 52.599.000 jiwa, atau 12.767.000 kepala keluarga (KK), yang terdiri dari:

1. Laki-laki sebanyak 28.294.000 orang
2. Perempuan sebanyak 24.305.000 orang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Tapung Hilir**  
**Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	28.294.000 Jiwa	43,68%
2	Perempuan	24.294.000 Jiwa	56,31%
Jumlah		52.599.000 Jiwa	100%

*Sumber:* Data dari Kantor Camat Tapung Hilir Tahun 2012

Mayoritas penduduk pada Kecamatan Tapung hilir berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 28.294.000 jiwa. Dengan demikian penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 24.305.000 jiwa.

Penduduk Kecamatan Tapung Hilir terdiri dari berbagai suku seperti, suku melayu, suku jawa dan suku batak, suku melayu merupakan suku yang asli di daerah tersebut. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu karyawan kasubag umum dan kepegawaian yang mengatakan bahwa suku asli pada Kecamatan Tapung Hilir memanglah suku melayu, akan tetapi dikarenakan banyaknya suku jawa dan batak yang



berpindah kedaerah ini maka mayoritas penduduk di kecamatan tapung hilir adalah suku jawa.<sup>3</sup>

### **C. Pendidikan dan Keagamaan**

#### **1. Pendidikan**

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan daerah. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan tingkat pendidikan atau sarana pendidikan yang memadai.

Seiring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi bagi dunia pendidikan. Karena dengan meningkatnya pendidikan dapat mengubah taraf hidup mereka dari keterbelakangan menjadi maju disegala bidang. Kepedulian masyarakat diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, serta usaha-usaha lain yang menjadikan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Adapun lembaga pendidikan formal yang ada di Kecamatan Tapung Hilir adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Khaeruddin, Kasubag Umum dan Kepegawaian, *Wawancara*, Kecamatan Tapung Hilir, 29 Mei 2012.

**Tabel II.3**  
**Sarana Pendidikan di Kecamatan Tapung Hilir**  
**Tahun 2012**

No	Jenis lembaga pendidikan	Jumlah	Kondisi
1	Taman kanak-kanak (TK)	23 Buah	Baik
2	Sekolah dasar (SD)	28 Buah	Baik
3	Sekolah lanjutan menengah pertama (SLTP)	6 Buah	Baik
4	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	5 Buah	Baik
5	Sekolah lanjutan menengah keatas (SLTA)	3 Buah	Baik
6	Madrasah Aliyah (MA)	2 Buah	Baik
Jumlah		67 Buah	Baik

*Sumber :* Data dari Kantor Dispora Kecamatan Tapung Hilir Tahun 2012

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Tapung Hilir masih sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah desa dan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Tapung Hilir tersebut, begitu juga bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang masih berusiakan seorang pelajar baik SLTP/sederajat maupun SLTA/sederajat, sarana pendidikan untuk sekolah menengah pertama dan keatas masih sangat kurang, dengan kondisi yang seperti itu tentunya memberikan pengaruh terhadap kurangnya kesempatan penduduk untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi dan ada pula yang memilih menyekolahkan anaknya kedaerah lain seperti Kecamatan Tapung serta tidak sedikit yang menyekolahkan anaknya ke Pekanbaru.

Sedangkan lembaga non formal juga terdapat di Kecamatan Tapung Hilir seperti tempat pengajian al-Qur'an yang biasanya dilakukan dirumah-rumah penduduk yang dianggap mempunyai kemampuan untuk mengajar

al-Qur'an (guru) ataupun di masjid-masjid setempat serta majelis ta'lim ibu-ibu.

## 2. Keagamaan

Agama merupakan suatu pegangan yang harus dijadikan sebagai landasan bagi seorang muslim. Agama merupakan suatu kekuatan yang bersifat non empiris yang dipercayakan dan digunakan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan beragama pada Kecamatan Tapung Hilir selain memiliki suku yang berbeda-beda tentunya juga memiliki Agama yang berbeda pula, akan tetapi mayoritas penduduk di Kecamatan tersebut menganut Agama Islam, dengan berbagai suku yang ada di Kecamatan tersebut tentunya penduduknya juga tidak mempunyai persamaan sikap, gaya hidup dan watak, namun penduduk di Kecamatan tersebut hidup dengan akur dan penuh kedamaian serta saling tolong-menolong dalam kebaikan.

Kasubag umum dan kepegawaian dalam wawancaranya dengan penulis menyatakan bahwa, sesuai data sensus penduduk tahun 2012, mayoritas penduduk di Kecamatan Tapung Hilir beragama Islam, hanya sebagian kecil penduduk yang beragamakan selain Islam.<sup>4</sup>

Pada Kecamatan Tapung Hilir terdapat banyak sekali tempat ibadah yang dipergunakan untuk kepentingan beragama dan juga untuk menjaga kemashalatan umatnya. Adapun tempat-tempat ibadah penduduk muslim dan non muslim dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

---

<sup>4</sup> Ahmad ,Sekretaris Kantor Urusan Agama, *Wawancara*, KUA Tapung Hilir, 29 Mei 2012.

**Tabel II.4**  
**Tempat Ibadah Masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten**  
**Kampar**  
**Tahun 2012**

No	Tempat Ibadah	Jumlah	Kondisi
1	Masjid	35	Baik
2	Mushallah	122	Baik
3	Gereja	25	Baik

*Sumber* :Dari Kantor Urusan Agama dan Kantor Kecamatan Tapung Hilir

Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tempat ibadah yang paling banyak terdapat di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar adalah tempat peribadatan umat Muslim, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Masjid sebanyak 35 buah, jumlah Mushallah sebanyak 122 buah. Sedangkan untuk tempat peribadatan non Muslim hanya berjumlah 25 buah dan tempat peribadatan tersebut lebih banyak terdapat di jalan lintas menuju Kabupaten Siak, tepatnya di Desa Sekijang, Kota Garo dan Kota Baru, sementara itu di beberapa Desa selain itu terdapat juga tempat Ibadah non Muslim bahkan ada beberapa Desa yang tidak memiliki tempat Ibadah untuk non Muslim.

#### **D. Keadaan Sosial Ekonomi**

Penduduk Kecamatan Tapung Hilir mempunyai adat kebiasaan dari warisan nenek moyang mereka dari dahulu sampai sekarang pada umumnya mereka adalah petani, sebagai sumber perekonomian yang paling utama bagi mereka, oleh karena itu, diantara jenis perekonomian yang dijadikan sebagai mata pencaharian paling dominan yaitu seperti:

#### 1. Tani

Keadaan pertanian masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir sangat mempengaruhi bagi perekonomian masyarakat setempat, dikarenakan bertani merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat pada perkebunan sawit yang terhampar luas tersebut, selain perkebunan sawit ada pula masyarakat yang menanam tanaman palawija seperti padi, jagung, serta umbi-umbian, dan ada pula yang berkebun sayur-sayuran baik untuk dijual maupun untuk kebutuhan sehari-hari.

#### 2. Dagang

Selain menjadi petani masyarakat Kecamatan tapung Hilir ada pula sebagian dari mereka yang berdagang, seperti para pedagang biasanya mereka menjual berbagai barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk sekelilingnya, guna untuk memperoleh hasil tanaman dari pertanian mereka.

#### 3. Pengrajin/perabot

Disamping itu, ada juga sebagian masyarakat Kecamatan Tapung Hilir yang bekerja dan berkarya untuk membuat alat-alat perabot rumah tangga, baik itu sebagai pekerjaan tambahan ataupun mata pencaharian tunggal.

#### 4. Nelayan

Selain usaha-usaha yang disebutkan diatas, ada juga sebagian dari masyarakat Kecamatan Tapung Hilir yang menangkap ikan disungai-sungai yang mengalir sepanjang daerah Kecamatan tersebut. Hasil dari tangkapan ikan mereka itu mereka jual dan sebagiannya mereka pergunakan untuk

kebutuhan mereka sendiri. Dengan menangkap ikan mereka mendapat hasil tambahan dari hasil usaha mereka lainnya.

#### 5. Pegawai negeri

Disamping petani, pedagang, pengrajin dan nelayan yang hidup ditengah-tengah masyarakat pada umumnya ada juga diantara mereka yang bertugas mengabdikan dirinya kepada negara yang disebut dengan pegawai negeri, diantara pegawai negeri sipil (PNS) seperti: Guru, Mantri dan bidan, mereka ini bekerja (mengajar) di sekolah-sekolah dan puskesmas.

Menurut Khaeruddin (kasubag umum dan kepegawaian), sekalipun mata pencaharian penduduk Kecamatan Tapung Hilir ini bermacam-macam, namun yang menjadi mata pencaharian paling utama yaitu petani sawit, hal ini sesuai dengan luas wilayah perkebunan sawit yang ada Kecamatan Tapung Hilir.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG *AL-MUSAQAH*

##### A. Pengertian *al-Musaqah*

Istilah *Musaqah* adalah bentuk *mufa'alah* dari *Saqu* “pengairan”, dan bentuk *mufa'alah* ini tidak mengandung arti sebagaimana biasanya. Artinya adalah mempekerjakan seseorang untuk memelihara dan menjaga kebun kurma atau anggur atau lainnya dengan imbalan yang ditentukan dari hasilnya.<sup>1</sup>

Menurut syari'at, *al-musaqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang sanggup mengairi atau memeliharanya sehingga buah dari pohon itu masak, dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut.

*Musaqah* adalah kerjasama (syirkah) antara pemilik pohon dengan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, seperti setengah, sepertiga dan sejenisnya.<sup>2</sup>

*Musaqah* yaitu menetapkan seseorang bekerja kepada pepohonan untuk dia menjaganya dengan mengairinya dan memerhatikan kepentingannya, agar rizki berupa buah-buahan yang diberikan Allah itu boleh dibagi bersama.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama dalam hukum Islam, dinyatakan bahwa *musaqah* adalah seseorang menyerahkan suatu tumbuhan (pohon) kepada

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *loc-cit*.

<sup>2</sup>Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta; CV.Haji Masagung,1994),h.129.

<sup>3</sup>Imam Taqituddin Abu bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Tarj; Syarifuddin,dkk (Singapura;Pustaka Nasional,1993),Cet;1,h.688.

seseorang yang lain untuk menyiraminya dan mengurusnya dengan perjanjian akan mendapat bagian tertentu dari buahnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan tersebut maka dapat dipahami bahwa pengertian *musaqah* adalah menggunakan tenaga orang lain yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengurus kebun dengan memperoleh bagi hasil tertentu dari hasil kebun tersebut.

Tanaman yang dimaksud dengan dalam kerja sama ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya seperti kelapa dan sawit, atau yang bergetah untuk mengharapkan getahnya, bukan tanaman tua untuk mengharapkan kayunya. Perawatan dalam kerja sama ini mencakup mengairi, menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya. Karena kerja sama disini dalam hal yang kerjanya maupun hasilnya berketerusan, maka ukuran kerja sama ditentukan oleh waktu.

Kerjasama dalam bentuk *al-musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum pasti.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian dari *al-musaqah* yang telah dijelaskan tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dinamakan dengan *al-musaqah* adalah bentuk perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dengan pemelihara kebun. Dengan demikian *al-musaqah* merupakan permu'amalahan

---

<sup>4</sup> Sa'di Abu Habib, *Mausun' atu al-ijmak*, Terj: A Sahal Machludz dan Mustofa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h.504.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Ramawangun : Prenada Media, 2003) h. 243



atau bermu'amalah terhadap kebun untuk diurus dengan ketentuan bagi hasil yang telah disepakati pada akad.

## B. Dasar Hukum *al-Musaqah*

Bagi hasil *al-musaqah* tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa ada dasar-dasar hukum yang membolehkannya, *al-musaqah* ini disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi SAW. Para ahli fiqih kebanyakan berpendapat membolehkan *al-musaqah*, karena melihat hal ini sangat dibutuhkan dan terdapat hikmah di dalam kebolehan kerjasama ini.

Jumhur ulama yakni: Imam Malik, Imam Syafi'i Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hassan dan dua orang terakhir ini adalah pengikut Imam Abu Hanifah yaitu Ahmad dan Daud, semuanya memerangi kebolehan bagi hasil ini dikecualikan oleh *as-Sunnah* dari larangan menjual sesuatu yang belum terjadi, dan dari sewa menyewa yang belum jelas.<sup>6</sup>

Jumhur fuqaha' membolehkan bagi hasil ini, Mereka berpegangan dengan Hadits shahih yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Hadits dari Ibnu Umar yang *shahih* yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ، فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُونَ وَسْقٍ تَمَرٍ وَعَشْرُونَ وَسْقٍ شَعِيرٍ ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ ، فَخَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَوْ يُمَضَى لَهُنَّ ، فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الْأَرْضَ

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, Ter : Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Jakarta, Pustaka Amani, 1995), Jilid 3, h. 249

Artinya: “Hadits Ibn Umar ra bahwasanya Rasulullah SAW, mengadakan perjanjian bagi hasil dengan penduduk khaibar dengan separoh dari hasil yang diperoleh dari kurma atau tanaman. Lalu Beliau memberi 100 wasaq kepada istri-istrinya yaitu 80 wasaq kurma masak, dan 20 wasaq gandum. Kemudian Umar membagi-bagi tanah khaibar serta meminta istri-istri Nabi SAW, memilih antara diberikan air dan tanah kepada mereka atau meneruskan pembagian yang telah dilakukan Nabi SAW. Lalu diantara istri-istri Nabi SAW, ada yang memilih tanah dan adapula yang memilih wasaq. Sedang Aisyah sendiri memilih tanah.” (HR.Bukhari).<sup>7</sup>

2. Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang *al-musaqah* antara Muhajirin dan Anshar, sebagaimana yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ . قَالَ « لَا » . فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمُنُونَةَ وَتُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ . قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا .

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra katanya: orang Anshar berkata kepada Nabi SAW, bagilah pohon-pohon kurma itu diantara kami dan saudara-saudara kami orang Muhajirin. Beliau bersabda: “Tidak” lalu orang Anshar berkata kepada orang Muhajirin: bayarlah kepada kami biaya pemeliharaannya, dan buahnya kita bagi. Orang Muhajirin menjawab: baiklah, kami setuju.” (HR. Bukhari).<sup>8</sup>

Ibn Rusyd juga mengemukakan dasar hukum *al-musaqah* berdasarkan kepada jumhur fuqaha yang berpegang kepada Hadits shahih Ibn Umar yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَطْرُ ثَمَرِهَا.

Artinya: dari Abdullah ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW, menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaibar pohon kurma dan

<sup>7</sup>Nasiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2007) h. 127. Lihat juga pada Kitab Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' Wal Marjan*, (Terjemahan al-lu'lu' wal Marjan) (Semarang : Toha Putra Group, 1993), Jilid 2, h. 344

<sup>8</sup>*Ibid*, h.134. Lihat juga pada Kitab Zainuddin Ahmad Az-Zubaidi, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, (Semarang, PT. Karya Toha Putra Semarang, 2007) Cet:1, h. 453.

*tanah khaibar dengan syarat mereka menggarapnya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya.”<sup>9</sup>*

Berdasarkan Hadits-hadits diatas tersebut maka Jumhur ulama sepakat menjadikan hadits Nabi SAW mengenai bagi hasil yang berlangsung di Khaibar tersebut sebagai landasan hukum kebolehan *al-musaqah*. Disamping itu akad *musaqah* ini dibutuhkan oleh manusia karena terkadang disatu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat mengurus dan merawatnya, sedangkan dipihak lain ada orang yang mampu dan sempat mengurus dan merawat pepohonan atau perkebunan, namun ia tidak memiliki pepohonan atau perkebunan tersebut, dengan demikian pihak pertama memerlukan penggarap sedangkan pihak lain memerlukan pekerjaan.<sup>10</sup>

### **C. Rukun, Objek dan Syarat-syarat *al-Musaqah***

Sebagai kerja sama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerja sama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad, dalam hal ini *al-musaqah* Merupakan pelaksanaan suatu akad dalam *bermu’amalah* dengan kerjasama dalam perawatan tanaman. Yang dimaksud “ tanaman” dalam *Mu’amalah* ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya seperti kelapa dan sawit atau yang bergetah untuk mengharapkan getahnya.<sup>11</sup>

Menurut Hanafiah rukun *musaqah* adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* dinyatakan oleh pemilik pepohonan, sedangkan *qabul* dinyatakan oleh penggarap. Menurut

---

<sup>9</sup> Imam Nawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Fikr,) Jilid 3, h.121

<sup>10</sup> Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafila Offset, 2010) Cet: 1,h406

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *loc.cit*

Malikiyah, akad *musaqah* mengikat (lazim) dengan diucapkannya lafal *ijab qabul*, tidak dengan pekerjaan. Sedangkan menurut Hanabilah, *musaqah* tidak perlu *ijab* dan *qabul* dengan lafal, melainkan cukup dengan memulai penggarapan secara langsung. Safi'iyah justru mensyaratkan adanya *qabul* dengan lafal.<sup>12</sup>

Menurut jumhur ulama rukun *musaqah* ada tiga, yaitu:

1. *'aqidain* (pemilik kebun dan penggarap)
2. Objek akad yaitu pekerjaan dan buah
3. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam masalah objek diperbolehkan dalam *musaqah*. Menurut Hanafiah adalah semua jenis pohon yang berbuah, seperti anggur dan kurma. Akan tetapi ulama-ulama dari *mutaakhirin* dari Hanafiah membolehkan *musaqah* dalam pohon-pohon yang tidak berbuah karena pohon-pohon tersebut sama-sama membutuhkan pengurusan dan perawatan.

Menurut Syafi'iyah, yang boleh di-*musaqah*-kan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiayah semua pohon yang mempunyai akar kebumi dapat di-*musaqah*-kan, seperti tebu.<sup>13</sup> Menurut Malikiyah, objek *musaqah* adalah tumbuh-tumbuhan seperti kacang dan pohon yang berbuah, yang memiliki akar yang tetap didalam tanah, misalnya anggur dan kurma yang berbuah dan lain-lain, dengan syarat:

1. Akad *musaqah* dilakukan sebelum buah kelihatan tua dan boleh diperjual belikan.

---

<sup>12</sup> Ahmad wardi muslich, *op-cit*, h. 407

<sup>13</sup> Hendi suhendi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada), h.149.

2. Akad *musaqah* ditentukan waktunya.<sup>14</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa pembatasan atas suatu pohon atau tanaman mana saja yang tidak boleh dilakukan bagi hasil *al-musaqah* tidak ada ditunjuki oleh Nash secara jelas oleh sebab itu tidaklah salah apabila mengambil pendapat yang membolehkan bagi hasil *al-musaqah* dilakukan terhadap semua tanaman sepanjang hal itu tidak bertentang dengan prinsip-prinsip dasar *bermuamalah* dalam tujuan ajaran Islam.

Syarat dalam melaksanakan *al-musaqah* atau bagi hasil ini, seperti yang dikemukakan Sayyid Sabiq dalam *Fiqh sunnah* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pohon yang akan dilakukan bagi hasil *al-musaqah* itu harus diketahui dengan penglihatan atau sifat yang tidak berbeda dengannya, karena akad terhadap sesuatu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah.
2. Bahwa masa *musaqah* diketahui karena ia merupakan akad lazim (keharusan) sehingga tidak ada unsur *gharar* (penipuan) di dalamnya.
3. Hendaknya akad *musaqah* dilakukan sebelum tampak buahnya, karena dalam kondisi seperti ini pohon perlu penggarapan.
4. Hendaknya *musaqi* (penggarap) mendapatkan bagian tertentu dari hasilnya seperti setengah atau sepertiga bagian.<sup>15</sup>

Ketika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka akad *musaqah* tidak sah dan batal. Apabila *musaqi* telah mulai bekerja dan tanaman telah tumbuh karena pekerjaannya maka dia berhak mendapatkan upah yang wajar, sementara pertumbuhan tanaman tersebut menjadi milik pemiliknya.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *loc-cit*

#### **D. Kewajiban *Musaqi* (pekerja)**

Sebagaimana yang diungkapkan oleh imam Nawawi, yang menjadi petugas pekerja bagi hasil *al-musaqah* adalah mengerjakan apa saja yang dilakukan oleh pohon/tanaman agar pohon itu dapat mendatangkan hasil atau buah. Untuk pohon yang berbuah musiman setiap tahun pekerja petugas menyirami, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon (bagaimana agar pohon itu dapat tumbuh dengan baik) memelihara buahnya dan sebagainya.

Sedang pekerjaan yang sifatnya tidak perlu dilakukan setiap tahun, seperti membangun pematang, menggali parit, ini adalah tanggung jawab pemilik kebun. Dalam hal tugas pekerja atau kewajiban pekerja ini Ulama sepakat bahwa yang menjadi tugasnya secara umum menyirami dan membuahkan.<sup>16</sup>

Jadi yang menjadi tugas pokok pekerja atau penggarap adalah mengerjakan sebagaimana layaknya, agar pohon atau tanaman itu dapat berbuah baik sebagainya lazimnya dilakukan disuatu tempat. Dan tentunya tidak termaksud mengerjakan sesuatu yang tidak langsung berhubungan dengan upaya peningkatan hasil / buah seperti pembuatan parit yang sifatnya permanen, pembuatan pagar keliling kebun.

Apabila dalam kerjasama bagi hasil *al-musaqah* ini atau penggarap yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya disebabkan suatu halangan, seperti karena sakit yang tidak mungkin dapat mengerjakan pekerjaan seperti yang telah disepakati dengan pihak pemilik kebun maka musaqahnya batal. Hal ini

---

<sup>16</sup> *Ibid.* h.367

berlaku apabila dalam musaqah disyaratkan bahwa musaqi harus menggarapnya sendirian, bila syarat itu tidak disyaratkan kepadanya maka musaqah tidak rusak, akan tetapi musaqi harus mencari orang yang sanggup menggantikan dirinya.<sup>17</sup>

#### **E. Berakhirnya Akaq *Musaqah***

Akad *musaqah* berakhir karena adanya beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak

Dalam hubungan ini Syafi'iyah berpendapat apabila buah keluar setelah habisnya masa musaqah maka penggarap tidak berhak untuk mengambilnya, karena masa penggarapan sudah habis. Akan tetapi, menurut Hanafiah apabila sampai dengan habisnya masa musaqah buah belum keluar atau belum masak maka berdasarkan *ihthihsan*, *musaqah* masih tetap berlaku sampai buah menjadi masak dan penggarap diberikan pilihan apakah mau berhenti atau terus bekerja tanpa diberi upah.<sup>18</sup>

Jika penggarap menolak untuk bekerja, pemilik atau ahli warisnya dapat melakukan tiga hal yaitu:

- a. Membagi buah dengan memakai persyaratan tertentu
- b. Penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik
- c. Membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil bagian penggarap sekedar pengganti pembiayaan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op-cit*, h. 415

<sup>19</sup> Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia), h.219

## 2. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad

Apabila salah satu seorang dari yang melakukan perjanjian bagi hasil *al-musaqah* meninggal, sedangkan pohon yang dijadikan objek bagi hasil sudah berbuah tapi belum jelas baiknya, maka untuk menjaga kemaslahatan masing-masing pihak, sipenggarap melangsungkan pekerjaan, atau ahli warisnya menggarap sampai buahnya menjadi masak. Sekalipun misalnya tindakan itu dilakukan secara paksa terhadap pemilik dalam artian jika pemilik keberatan.

Jika sipekerja atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya masa atau fasaknya perjanjian (akad), mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi jika mereka hendak memetik buah belum masak yang demikian tidak mungkin. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya dalam hal apabila terhadap ketentuan sebagai berikut:

- a. Kesepakatan memetik buah dan membaginya sesuai kesepakatan.
- b. Memberikan pada pekerja atau ahli warisnya uang sesuai dengan bagian mereka, sebab merekalah yang berhak mengambil buahnya.
- c. Pembiayaan pohon sampai buahnya masak, kemudian kembali pada pekerja atau ahli warisnya, atau ia mengambil buahnya yang menjadi bagiannya. Demikian pendapat dikemukakan oleh golongan Hanafi.<sup>20</sup>

Apabila kedua orang yang berakad meninggal, yang paling berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap. Jika ahli waris itu menolak, *musaqah* diserahkan kepada pemilik tanah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *op-cit*, h.300.



### 3. Membatalkan baik dengan ucapan secara jelas ataupun dengan *udzur*

Diantara *udzur* yang dapat membatalkan *musaqah* adalah:

- a. Penggarap sakit sehingga ia tidak mampu bekerja
- b. Penggarap sedang berpergian
- c. Penggarap terkenal sebagai seorang pencuri yang dikhawatirkan ia akan mencuri buah sebelum dipetik.

Menurut Syafi'iyah *musaqah* tidak batal karena adanya *udzur*. Apabila penggarap berkhianat misalnya, maka ditunjuklah seorang pengawas yang mengawasi pekerjaannya sampai selesai. Sedangkan Hanabilah sama pendapatnya dengan Syafi'iyah, yaitu *musaqah* tidak batal karena adanya *udzur*. Apabila penggarap sakit misalnya dan ia tidak mampu bekerja maka ditunjuk orang lain yang menggantikannya untuk sementara, tanpa mencabut kewenangan penggarap.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *musaqah* adalah akad yang dapat di wariskan. Dengan demikian ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan garapan. Akan tetapi, jika ahli warisnya menolak, pemilik harus menggarapnya, Imam Malik juga berpendapat jika penggarap itu adalah seorang pencuri atau orang zhalim, maka akad tersebut tidak batal.<sup>22</sup>

## **F. Perbedaan antara Musaqah, Muzara'ah dan Mukhabarah**

*Al-musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah*, dimana *muzara'ah* yaitu kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan

---

<sup>21</sup> Syafe'i Rachmad, *loc-cit*

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *op-cit*, h.261.

penggarap yaitu berupa pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Muzara'ah* sering kali diidentikkan dengan *mukhabarah*, diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan yaitu dalam *muzara'ah* benih dari pemilik lahan sedangkan dalam *mukhabarah* benih dari penggarap.<sup>23</sup>

Sementara dalam *musaqah* penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Jadi diantara *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah* saling diidentikkan satu sama lainnya hanya saja terdapat sedikit perbedaan diantara ketiganya.

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *musaqah* sama dengan *muzara'ah*, kecuali dengan empat perkara yaitu:

1. Jika salah seorang yang menyepakati akad tidak memenuhi akad dalam *musaqah* ia harus dipaksa, tetapi dalam *muzara'ah* ia tidak boleh dipaksa.
2. Jika waktu *musaqah* habis akad diteruskan sampai berbuah tanpa pemberian upah, sedangkan dalam *muzara'ah* jika waktu habis, pekerjaan diteruskan dengan pemberian upah.
3. Waktu dalam *musaqah* ditetapkan berdasarkan *istihsan*, sebab dapat diketahui dengan tepat, sedangkan waktu dalam *muzara'ah* terkadang tidak tertentu.

---

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet.1 h. 99-100.

4. Jika pohon diminta oleh selain pemilik tanah, dalam *musaqah* penggarap diberi upah sedangkan dalam *muzara'ah* jika diminta sebelum menghasilkan sesuatu penggarap tidak mendapatkan apa-apa.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi *al-Musaqah* pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar**

Manusia didorong untuk menggunakan kemampuan ataupun potensi yang ada dalam dirinya, tentunya tidak bisa terlepas dari sumber daya alam yang tersedia dimana tempat ia tinggal. Begitu pula dengan masyarakat Kecamatan Tapung Hilir yang telah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi serta sumber daya alam yang tersedia yaitu pertanian/perkebunan, dalam hal ini masyarakat Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar memiliki mata pencaharian dengan membudidayakan sawit sebagai sumber perekonomian mereka.

Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, tidak semua masyarakat mempunyai kebun kelapa sawit, akan tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk menggarapnya, dan begitu pula sebaliknya, ada pula masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit akan tetapi tidak mempunyai kemampuan dan bahkan tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya. Untuk menghindari terjadinya keterlantaran kebun dan lahan dan demi kelangsungan hidup, maka mereka melakukan akad kerjasama untuk mengelolah/memelihara kebun kelapa sawit tersebut.

Perawatan dalam kerjasama bagi hasil *al-musaqah* di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yaitu mencakup *memiringi* (membersihkan rumput

disekitar pohon sehingga berbentuk seperti piring), memupuk pohon sawit, menyemprot rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan pohon sawit dengan racun hama serta mengambil pelepah sawit yang menghambat pertumbuhan buah (menunas) serta usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.

Pelaksanaan *al-musaqah* pada kebun sawit telah lama dilakukan masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dari hasil pengamatan dilapangan yang menyebabkan terjadinya kerjasama bagi hasil *al-musaqah* dikarenakan berbagai alasan diantaranya yaitu:

1. Pemilik kebun yang bertempat tinggal jauh dari perkebunannya
2. Pemilik kebun yang tidak memiliki keahlian dalam merawat perkebunannya karena perawatan kebun sawit sebelum berbuah dan sampai berbuah kecil- kecil (pasir) itu membutuhkan perawatan yang sangat extra
3. Usia pemilik kebun yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja
4. Pekerja kebun yang tidak memiliki perkebunan sehingga membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan mereka, dan
5. Selain tidak memiliki perkebunan pekerja juga tidak memiliki keahlian dibidang yang lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wahyudi ,Ketua Kelompok Tani, *Wawancara*, Tapung Hilir, 30 Juli 2012

Kerjasama dalam bentuk *al-musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum pasti, akan tetapi kerjasama dalam bentuk *al-musaqah* ini bagi hasil yang didapatkan yaitu dari banyaknya buah yang didapatkan dari hasil panen atas buah tersebut, jadi setelah buah dipanen dan dijual lalu hasil dari penjualan buah sawit tersebut dibagi antara pemilik kebun dan pekerja setelah dipotong dari biaya pembelian pupuk dan racun hama.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan perawatan kebun sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. pemilik kebun dan pekerja kebun sawit mengadakan kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama dalam perawatan kebun sawit. Sebelum ada kesepakatan antara pemilik kebun sawit dan pekerja kebun biasanya ditentukan terlebih dahulu bagian masing-masing dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik kebun sawit yaitu:
  - a. Pekerja kebun sawit harus membersihkan dan merawat serta memanen buah hasil dari pohon sawit tersebut.
  - b. Pekerja kebun sawit hanya berhak mengambil hasilnya setelah dilakukan pemanenan dan hasilnya diuangkan lalu dibagi sesuai kesepakatan diawal.
2. Pembagian hasil yang diperoleh dari kerjasama *al-musaqah* ini yaitu sistem bagi dua (paroan),

yang dimaksud dengan sistem bagi dua ini adalah dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada pekerja kebun untuk dirawat dan diambil hasilnya. Adapun pembagian dari hasil perkebunan sawit tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka. Dalam sistem ini biasanya semua peralatan ditanggung oleh pekerja kebun sedangkan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon seperti pupuk dan racun hama ditanggung oleh pemilik kebun sehingga dalam bagi hasil mereka ada yang bagi dua saja (50:50) dan tidak sedikit membaginya dengan perbandingan 60:40 per bagian masing-masing.<sup>2</sup>

Pelaksanaan *al-musaqah* pada Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar telah lama dilakukan, dan sudah menjadi pekerjaan tetap bagi masyarakat yang tidak memiliki kebun sawit. Namun kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar adalah perkebunan yang jauh dari perkampungan, jadi dibutuhkan kerjasama dengan pekerja untuk menjaga, merawat dan mengambil hasil dari pohon sawit tersebut.

Dari tabel dibawah ini dapat kita lihat siapa yang menginginkan kerjasama bagi hasil *al-musaqah* ini.

**Tabel IV.1**  
**Tanggapan Responden Tentang Keinginan Kerjasama**

No	Tanggapan Responde	Frekuensi	Persentase %
1	Pemilik kebun sawit	7	14.6%
2	Pekerja kebun sawit	8	16.7%
3	Kedua belah pihak	33	68.7%
Jumlah		48	100%

---

<sup>2</sup> Somba (Pekerja Kebun Sawit), Wawancara, 29 Agustus 2012

*Sumber data : Olahan*

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa 7 orang responden atau 14.6% pemilik kebun sawit menginginkan kerjasama ini, 8 orang atau 16.7% pekerja kebun sawit yang menginginkannya, dan 33 orang atau 68.7% kedua belah pihak yang menginginkannya.

Berdasarkan alasan responden pemilik kebun sawit yang tidak sanggup untuk mengerjakannya lagi, dikarenakan usia yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja serta memiliki lahan yang cukup luas, atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya lagi dikarenakan ada pekerjaan ataupun kesibukan lain, dari alasan penggarap lahan karena lahannya hanya sedikit bahkan ada yang tidak memiliki lahan maka mereka menginginkan kerjasama ini, dan dari kedua belah pihak ada yang mengatakan dari pada kurang terurus karena tidak bisa selalu merawat kebun sawit tersebut lebih baik memberikannya kepada keluarga atau pihak lain untuk merawatnya.<sup>3</sup>

Masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar lebih cenderung melakukan perjanjian (kesepakatan) atau tidak pada saat kebun diserahkan kepada pekerja kebun sawit, hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel IV.2**  
**Tanggapan Responden Tentang Perjanjian Sebelum Bekerja**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	48	100%
2	Tidak	-	-
3	Kadang-kadang	-	-
Jumlah		48	100%

---

<sup>3</sup> Haholongan Rambe ,Pemilik Kebun Sawit, *Wawancara*, Tapung Hilir, 9 Juni 2012



*Sumber data : Olahan*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua responden 48 orang atau 100% pemilik kebun melakukan perjanjian atau kesepakatan pada saat kebun diserahkan kepada pekerja kebun sawit, kesepakatan disini hanya bentuk lisan bukan tulisan, mereka beralasan apabila perjanjian dilakukan dalam bentuk tulisan akan membuang-buang waktu saja, karena sudah saling mengenal.

Kemudian setelah melakukan kesepakatan dalam kerjasama apakah pemilik kebun sawit menjelaskan mengenai sifat-sifat kebun sawit tersebut atau tidak , hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.3**  
**Tanggapan Responden Tentang Penjelasan Sifat-Sifat Kebun**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Dijelaskan	18	75%
2	Kurang dijelaskan	6	25%
3	Tidak dijelaskan	-	-
Jumlah		24	100%

*Sumber data : Olahan*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, 18 orang atau 75% mengatakan bahwasanya pemilik kebun telah menjelaskan mengenai sifat-sifat kebun sawit tersebut, 6 orang atau 25% mengatakan kurang dijelaskan mengenai sifat-sifat kebun sawit tersebut, mereka mengatakan bahwa sebagian pemilik kebun hanya memberi tahu letak kebun sawit yang akan dilakukan kerjasama bagi hasil, serta batas-batasnya. Mengenai sifat-sifat pohon sawit itu sendiri pemilik kebun tidak menjelaskannya, mereka berpendapat bahwa pekerja kebun lebih mengetahuinya.

Setelah pemilik kebun menjelaskan sifat-sifatnya, kemudian ditentukan atau tidak batas waktu berakhirnya kerjasama ini, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.4**  
**Tanggapan Responden Tentang Yang Berhak Menentukan Batas Waktu Kerjasama**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Pemilik kebun sawit	13	27.1%
2	Pekerja kebun sawit	14	29.1%
3	Tidak ditentukan	21	43.8%
Jumlah		48	100%

*Sumber data : Olahan*

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa 13 orang atau 27.1% menyebutkan pemilik kebun yang menentukan batas waktu kerjasama ini berakhir, 14 orang atau 29.1% menyebutkan pekerja kebun sawit yang menentukan batas waktu berakhirnya kerjasama ini, dan 21 Orang atau 43.8% mengatakan tidak ditentukan batas waktu berakhirnya kerjasama ini, karena masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir sudah menjadi kebiasaan mereka memutuskan kerjasama bagi hasil *al-musaqah* apabila menurut mereka kerjasama tersebut sudah tidak sesuai dengan yang mereka inginkan.

Dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil ini, setelah menjelaskan sifat-sifatnya serta batas waktu pengerjaannya, selanjutnya mengenai setiap berapa kali pekerja kebun sawit rutin melakukan pemanenan atas buah sawit tersebut, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel IV.5**

### **Tanggapan Responden Tentang Waktu Pembagian Hasil**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase %
1	2 minggu sekali	14	29.2%
2	3 minggu sekali	-	-
3	1 bulan sekali	34	70.8%
Jumlah		48	100%

*Sumber data : Olahan*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa 14 orang atau 29.2% mengatakan 2 minggu sekali dilakukan pembagian hasil yang diperoleh dari kebun sawit tersebut pemanenan atas buah sawit tersebut dan 34 orang atau 70.8% mengatakan bahwa pembagian hasil panen dilakukan 1 bulan sekali karena kebun sawit tersebut belum diatas 5 tahun dilakukan penanaman, jadi buah yang dihasilkan juga tidak terlalu banyak. Sehingga banyak petani sawit yang melakukan pembagian hasil yaitu selama sebulan sekali sehingga hasil yang diperoleh juga tidak terlalu sedikit.<sup>4</sup>

Setelah mengetahui setiap berapa kali dilakukan pembagian hasil panen atas buah sawit tersebut, selanjutnya mengenai setiap berapa kali dilakukan perawatan terhadap kebun sawit tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.6**  
**Tanggapan Responden Tentang Setiap Berapa Kali Dilakukan Perawatan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase %
1	2 bulan sekali	17	35.4%
2	3 bulan sekali	31	64.6%
3	6 bulan sekali	-	-
Jumlah		48	100%

*Sumber data : Olahan*

---

<sup>4</sup>Sumedi, Pemilik Kebun Sawit, *Wawancara*, Tapung Hilir, 30 Juli 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 17 orang atau 35.4% mengatakan bahwa perawatan kebun sawit dilakukan setiap 2 bulan sekali, 31 orang atau 64.6% mengatakan bahwa perawatan kebun sawit dilakukan setiap 3 bulan sekali, mereka mengatakan bahwa perawatan kebun sawit lazimnya dilakukan 3 bulan sekali, baik itu *memiringi* memupuk ataupun menyemprot, dan yang melakukan perawatan 2 bulan sekali tersebut bisa dikarenakan tanah yang terlalu subur sehingga rumput-rumput yang mengelilingi kebun sawit tersebut tumbuh subur pula, atau tanah yang terlalu gersang sehingga dibutuhkan pupuk untuk perawatan sawit tersebut, hal ini yang menyebabkan perawatan kebun sawit dipercepat dari 3 bulan sekali menjadi 2 bulan sekali.<sup>5</sup>

Setelah menjelaskan sifat-sifat kebun sawit tersebut dan sipekerja telah melakukan tugasnya sampai waktunya untuk memanen buah dari pohon sawit tersebut, dan pembagian hasil, lalu mengenai apakah didapatkan keuntungan dari kerjasama ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel IV.7**  
**Tanggapan Responden Tentang Adanya Keuntungan Dalam**  
**Kerjasama**

No	Tanggapan Rensponden	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	48	100%
2	Biasa-biasa saja	-	-
3	Tidak	-	-
Jumlah		48	100%

*Sumber data : Olahan*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh responden 48 orang atau 100% mengatakan mereka mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini,

---

<sup>5</sup> Akmal ,Pekerja Kebun Sawit, *Wawancara*, Tapung Hilir, 29 Agustus 2012

sehingga dengan adanya keuntungan tersebutlah yang menjadikan mereka mau melakukan kerjasama tersebut.

Mereka mengatakan sama-sama diuntungkan, bagi pemilik kebun kerjasama ini sangat menguntungkan sekalipun hasil yang didapat dibagi dua, karena perawatan kebun sawit ini bukan hal yang mudah dan perlu keahlian khusus juga dalam merawatnya, dan pekerja kebun sawit mengatakan merasa diuntungkan karena bisa membiayai kehidupan keluarganya.

Dengan adanya keuntungan dari hasil kerjasama ini tentunya menjadikan perekonomian mereka meningkat atau terbantu, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel IV.8**  
**Tanggapan Responden Tentang Terbantunya Perekonomian**  
**Petani Sawit**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	24	100%
2	Sama saja	-	-
3	Tidak	-	-
Jumlah		24	100%

*Sumber data : Olahan*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa 24 orang atau 100% responden mengatakan kerjasama ini menjadikan perekonomian mereka terbantu, mereka mengatakan bahwa dengan adanya kerjasama ini sangat membantu perekonomian mereka, terutama mereka yang tidak memiliki kebun sawit sama sekali, dan mereka bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Selama pelaksanaan kerjasama *al-musaqah* ini apakah pernah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pekerja kebun terhadap perawatan kebun sawit, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.9**  
**Tanggapan Responden Terjadinya Penyimpangan Selama**  
**Kerjasama**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Pernah	12	50.0%
2	Tidak pernah	9	37.5%
3	Kadang-kadang	3	12.5%
Jumlah		24	100%

*Sumber data : Olahan*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 12 orang atau 50.0% mengatakan bahwa pemilik kebun pernah melakukan penyimpangan dalam perawatan kebun sawit, 9 orang atau 37.5% mengatakan tidak pernah terjadi penyimpangan dalam perawatan kebun sawit yang dilakukan oleh pekerja, 3 orang atau 12.5% mengatakan kadang-kadang terjadi penyimpangan, pemilik kebun mengatakan penyimpangan yang sering terjadi pencurian buah sawit yang dilakukan oleh pekerja kebun, pada awalnya pemilik kebun mencurigai karena setiap tiba waktu pembagian hasil, hasil yang diperoleh itu semakin sedikit sedangkan pohon sawit semakin hari semakin tumbuh besar seharusnya hasilnya juga semakin banyak, selain itu dalam perawatan pohon sawit (pengambilan pelepah) juga kurang baik sehingga bisa mengakibatkan pohon sawit rusak.<sup>6</sup>

Dalam perawatan kebun sawit tersebut terkadang pekerja kebun sawit tidak bisa melaksanakan tugasnya dan bagaimana cara mereka mengatasinya, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.10**  
**Tanggapan Responden Tentang Hal Tidak Bisa Melaksanakan**  
**Kewajiban**

---

<sup>6</sup>Jopan ,Pemilik Kebun Sawit, *Wawancara* , Tapung Hilir, 30 Juli 2012

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Mencari pekerja lain	19	79.2%
2	Menunda pekerjaan	-	-
3	Menyerahkan kepada pemilik kebun	5	20.8%
Jawaban		24	100%

*Sumber data : Olahan*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 19 orang atau 79.2% mengatakan mencari pekerja lain apabila mereka tidak bisa melakukan tugasnya, 5 orang atau 20.8% mengatakan menyerahkan kepada pemilik kebun, menurut mereka apabila mereka tidak bisa mengerjakan tugasnya maka mereka akan mencari pekerja lain karena waktu yang sudah tidak memungkinkan bagi pemilik kebun untuk mencari pekerja baru untuk sementara, begitu pula sebaliknya bagi mereka yang menyerahkan kepada pemilik kebun dikarenakan dari jauh-jauh hari mereka telah mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan tugas mereka untuk beberapa waktu.

Kemudian apakah dalam pembagian hasil dalam kerjasama ini pernah terjadi perselisihan, hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.11**  
**Tanggapan Responden Tentang Terjadinya Perselisihan Dalam**  
**Pembagian Hasil**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Pernah	16	33.3%
2	Tidak pernah	21	43.7%
3	Kadang-kadang	11	23.0%
Jumlah		48	100%

*Sumber data : Olahan*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 9 oarang atau 18.8% mengatakan pernah terjadi perselisihan antara pemilik kebun dan pekerja

mengenai pembagian hasil, 33 orang atau 68.7% mengatakan tidak pernah terjadi perselisihan, 6 orang atau 68.7% mengatakan kadang-kadang terjadi perselisihan.

Mereka mengatakan sering terjadi perselisihan dalam pembagian hasil, terkadang hal tersebut terjadi karena turunnya harga sawit dan hal tersebut tentunya mengakibatkan turunnya pendapatan pekerja sementara kebutuhan semakin meningkat, maka apabila harga sawit turun pemilik dan pekerja kebun sawit sepakat memberikan seluruh buah kepada pekerja kebun asalkan kebunnya tetap dirawat dengan baik sampai harga sawit tersebut normal kembali.<sup>7</sup>

Dari data diatas dapat kita disimpulkan bahwa lebih banyak yang mengatakan tidak pernah terjadi perselisihan pada saat pembagian hasil, hal tersebut dikarenakan pemilik kebun selalu memberikan bagian hasil kepada pekerja sebagaimana kesepakatan diwaktu akad terjadi, namun ada pula beberapa orang yang menyatakan pernah dan kadang-kadang terjadi, hal tersebut dikarenakan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya adanya unsur-unsur penyimpangan yang terjadi.

Selanjutnya mengenai pembagian hasil disebutkan diwaktu akad, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.12**  
**Tanggapan Responden Tentang Pembagian Hasil Disebutkan**  
**Ketika Akad**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Disebutkan	32	66.7%

---

<sup>7</sup>Roma, Pekerja Kebun Sawit, *Wawancara*, Tapung Hilir, 29 agustus 2012



2	Kadang-kadang	7	14.6%
3	Tidak disebutkan	9	18.7%
Jumlah		48	100%

*Sumber data : Olahan*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 32 orang atau 66.7% mengatakan bagian atas hasil yang didapat dari kebun sawit tersebut disebutkan ketika akad, 7 orang atau 14.6% mengatakan tidak disebutkan, 9 orang atau 18.7% mengatakan kadang disebutkan dan kadang tidak disebutkan.

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa masih ada yang tidak menyebutkan bagian hasil pada akad, hal tersebut disebabkan karena mereka sudah terbiasa melakukan kerjasama bagi hasil tersebut, dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka sudah mengenal pemilik kebun dan pernah melakukan kerjasama dengan orang yang mereka kenal sehingga mereka telah tahu berapa bagian hasil yang akan diberikan pemilik kebun kepada pekerja.<sup>8</sup>

Dengan melakukan kerjasama ini dalam pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan kesepakatan diawal atau tidak sesuai, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.13**  
**Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Kerjasama Sesuai Dengan Kesepakatan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Sesuai	31	64.5%
2	Kurang sesuai	11	23.0%
3	Tidak sesuai	6	12.5%
Jumlah		48	100%

*Sumber data : Olahan*

---

<sup>8</sup> Jekki, Pekerja Kebun Sawit, *Wawancara*, Tapung Hilir, 29 Agustus 2012

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa 31 orang atau 64.5% mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan diawal, 11 orang atau 23.0% mengatakan pelaksanaan kerjasama ini kurang sesuai dengan kesepakatan diawal, dan 6 orang atau 12.5% mengatakan tidak sesuai, alasan mereka mengatakan demikian dikarenakan masih ada terjadi penyelewengan-penyelewengan ringan maupun berat yang terjadi dalam kerjasama bagi hasil ini, baik itu mengenai perawatan kebun maupun mengenai pembagian hasilnya.<sup>9</sup>

Alasan mengenai mengapa masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar melakukan kerjasama bagi hasil *al-musaqah* ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.14**  
**Tanggapan Responden Tentang Alasan Dilakukannya Kerjasama**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Untuk tujuan dimasa yang akan datang	25	52.1%
2	Memenuhi kebutuhan	14	29.2%
3	Menambah penghasilan	9	18.7%
Jumlah		48	100%

*Sumber data: Olahan*

Berdasarkan tabel diatas terlihat alasan yang diberikan kalangan responden pemilik kebun dan pekerja kebun sawit. Alasan dijalankannya kerjasama ini karena mempunyai tujuan atau rencana dimasa akan datang, ada sebanyak 25 orang atau 52.1%.

Alasan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk menambah penghasilan lebih kecil dari pada alasan diatas dimana jumlah responden 14 dengan

---

<sup>9</sup>Dindin ,Pemilik Kebun Sawit,*Wawancara*, Tapung Hilir, 30 Juli 2012

persentase 29.2%. Sementara alasan untuk menambah penghasilan dengan jumlah respondennya 9 orang atau 18.7%.

Kerjasama ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan sudah menjadi kebiasaan, sehingga hal itu selalu mereka lakukan dengan alasan yang berbeda-beda, baik itu untuk tujuan dimasa yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan dan untuk menambah penghasilan, karena sudah menjadi kebiasaan.

#### **B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Al-Musaqah Pada Petani Sawit Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar**

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, aspek yang dibawanya dapat menampung dan menyelesaikan semua persoalan, baik dibidang ibadah maupun yang berhubungan dengan *mua'malah*.<sup>10</sup> Islam memberikan pedoman kepada umat manusia, yang menjamin akan mendatangkan kebahagiaan hidup perorangan dan kelompok, jasmani dan rohani, di dunia saat ini dan di akhirat kelak.

Manusia tentunya menginginkan bermacam-macam keperluan dalam kehidupannya bisa terpenuhi, untuk mempertahankan hidupnya, seperti memerlukan makan dan minum, tempat tinggal dan pakaian serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan kebutuhan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia berusaha dalam hidupnya.

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op-cit.* h.13

Mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia yang beraneka ragam, dalam al-Quran ditunjukkan pula bagaimana cara manusia seharusnya dalam memenuhi kebutuhannya tersebut baik secara jelas maupun secara tersirat. Disamping itu diberikan pula bermacam cara yang benar untuk ditempuh dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup itu, ringkasnya telah diberikan pedoman oleh Allah kepada manusia bagaimana cara yang dihalalkan oleh agama.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-nissa (4) : 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”<sup>11</sup>

Dan firman Allah pada QS. Abasa (80) : 24-32,

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا  
الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَيْنًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا  
﴿٢٩﴾ وَحَدَاقٍ غَلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفِكَهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَّتَعًا لَّكُمْ وَلَئِن نَّعْمِمْكُمْ

Artinya : “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, sesungguhnya kami telah mencurahkan air (dari langit), kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kura, kebun-kebun lebat, buah-buahan dan rumput-rumputan (semua itu) untuk memenuhi kesenanganmu dan untuk binatang-binatangmu”.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Depag, RI, *op-cit*, h.84.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 586.

Dari ayat di atas telah jelas kita lihat bahwa Allah SWT melarang manusia memakan harta sesama manusia lain dengan cara yang bathil, dan Allah juga mengisyaratkan kepada manusia agar mengelolah alam ini terutama tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menanam berbagai macam tanaman.

Dalam hal ini berkaitan dengan tanaman kelapa sawit, dalam usaha pengembangannya baik itu secara perorangan dan adapula dengan melibatkan orang lain yaitu dengan cara bekerjasama sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya.

Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan baik itu melalui observasi, wawancara serta dengan menyebarkan angket kepada responden yang berkaitan dengan permasalahan pada karya tulis ini, penulis berpendapat bahwa kerjasama bagi hasil *al-musaqah* antara pemilik kebun dan pekerja kebun sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menimbulkan kesamaran (*gharar*).

Penulis menyimpulkan demikian dikarenakan kerjasama merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang tidak merugikan salah satu pihak dalam kerjasama tersebut. Namun dalam kerjasama ini terdapat penyimpangan yaitu berupa kecurangan dalam pembagian hasil, dimana pekerja sering melakukan pemanenan buah sawit tanpa sepengetahuan pemilik kebun dan hasilnya tidak disatukan dengan hasil panen lainnya, dengan kata lain pekerja tersebut melakukan pencurian.

Maka ketika masih terdapat unsur penyimpangan didalam kerjasama tersebut maka akad tersebut akan menjadi *fasakh* atau rusak, Dan hal ini

tentunya tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam bekerjasama, dimana setiap kerjasama dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan, karena Islam tidak membenarkan slogan “tujuan menghalalkan segala cara.”<sup>13</sup> Yang artinya bahwa segala bentuk kerjasama yang mengandung unsur penindasan atau sejenisnya tidak dapat dibenarkan pelaksanaannya.

Apabila diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil *al-musaqah* pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sebagaimana yang telah diuraikan diatas terutama mengenai syarat-syarat dalam kerjasama bagi hasil *al-musaqah* ini ditemukan beberapa hal yang dipandang *gharar* dan perlu mendapat perhatian, diantaranya:

1. Dalam kerjasama tidak dilakukan perjanjian secara tertulis, hal ini yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan, baik itu datangnya dari pemilik kebun maupun pekerja kebun sawit.
2. Pelaksanaan bagi hasil *al-musaqah* di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagian besar tidak menentukan batas waktu berakhirnya kerjasama, hal ini mengakibatkan pemilik kebun dapat mengambil kebunnya kapan saja dengan merugikan pekerja kebun.

Sementara jika kita perhatikan konsep fiqih bahwa batas waktu berakhirnya kerjasama itu dikemukakan sewaktu pelaksanaan bagi hasil itu akan dilaksanakan, hal ini juga sesuai dengan pendapat Jumhur bahwa

---

<sup>13</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. 1, h. 38

penentuan batas waktu harus dikemukakan sewaktu kerjasama bagi hasil itu akan dilaksanakan.

Apabila dilihat dari segi manfaatnya, penentuan batas waktu dalam pelaksanaan bagi hasil *al-musaqah* adalah sesuatu yang dipandang harus ada, sebab apabila tidak ditentukan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan yang merugikan salah satu pihak dalam kerjasama ini, seperti pemilik kebun yang dapat kapan saja mengambil kebunnya, dan pekerja kebun sawit dapat kapan saja mengembalikan kebun yang dikerjakannya kepada pemilik kebun.

Maka agar tidak terjadi sesuatu yang melanggar ketentuan hukum Syara' yaitu pemilik kebun akan mengambil hak orang lain dan pekerja kebun akan meninggalkan kewajibannya dengan cara yang tidak sah, maka syarat penentuan batas waktu itu harus menjadi syarat sahnya perjanjian bagi hasil *al-musaqah*.

Begitu pula dalam pelaksanaan bagi hasil yang berlaku pada masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar bahwa hasil yang dibagi antara pemilik kebun dan penggarap adalah berupa jumlah uang yang diperoleh dari penjualan buah sawit tersebut. Sementara menurut konsep fiqih diketahui haruslah berupa jumlah buah sebagaimana yang telah dikemukakan dalam tulisan terdahulu.

Mengenai pembagian hasil tersebut terjadi beberapa perbedaan pendapat, dan apabila dilihat dari segi kemaslahatan yang ditimbulkan dari kejadian di atas yaitu berupa uang yang dihasilkan dari penjualan buah itu lebih banyak mengandung kemudahan dikedua belah pihak. Oleh sebab itu, tindakan bagi

hasil seperti ini tidak bertentangan dari hukum yang ada, dimana suatu hukum itu ditetapkan tiada lain maksud yang sesungguhnya yaitu untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

Dalam hal seperti ini, maka berlakulah dalil *ijtihad* yaitu *masalah mursalah*, yang berarti suatu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat/hadis).<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan bagi hasil *al-Musaqah* ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dimana masyarakat tersebut berusaha untuk merubah nasibnya yaitu dari yang tidak memiliki apa-apa lalu berusaha untuk memenuhi kehidupan keluarganya baik itu untuk keperluan sehari-hari maupun untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd (13):11,

.... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ....

Artinya : “Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak mau merubahnya”.

Maksud dari ayat di atas yaitu bahwa usaha perubahan yang pada akhirnya lebih besar pengaruhnya dan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat itu harus didasari pada diri seseorang yang mau merubahnya.

Pelaksanaan *al-musaqah* dari sisi dampak dan pengaruhnya dapat dikatakan cukup positif, akan tetapi dari segi prosedur pelaksanaannya masih ditemukan unsur-unsur penyimpangan yang menimbulkan kesamaran (*gharar*) menurut syariat Islam.

---

<sup>14</sup> Sayyid sabiq, *op-cit*, h.296





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa permasalahan dalam kajian ini, maka untuk menutup kajian ini penulis perlu membuat beberapa jawaban dari permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi hasil *al-musaqah* adalah suatu kerjasama antara pemilik pohon dengan pemeliharaan pohon dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaannya saja. Sedangkan dalam pemeliharaan kelapa sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ini adalah pemilik kebun kelapa sawit memberikan kebun miliknya yang sudah ditanami untuk dipelihara kepada pekerja sehingga bisa menghasilkan buah yang baik dan hasil yang didapat dibagi dua oleh pemilik dan pekerja sesuai kesepakatan bersama. Selain dapat meningkatkan perekonomian petani sawit juga dapat menghindari keterlantaran lahan..
2. Menurut perspektif ekonomi Islam, pelaksanaan bagi hasil *al-musaqah* kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar mempunyai tujuan yang baik untuk kelangsungan hidup petani sawit, akan tetapi dalam pelaksanaanya belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam bekerjasama, karena selain sering terjadi perselisihan dalam pembagian hasil juga tidak semua pemilik dan pekerja

sawit menetapkan batas waktu kapan berakhir pelaksanaan bagi hasil *al-musaqah* ketika melakukan akadnya tidak menentukan sifat, jenis dan macamnya, yang kesemuanya itu menjadi syarat dan rukun dalam bagi hasil *al-musaqah*.

## **B. Saran-saran**

Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran dan pesan kepada para pembaca, semoga dapat dijadikan solusi dan bahan masukan, terutama bagi masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Adapun saran dan pesannya adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, hendaklah meninjau kembali akan pelaksanaan kerjasama bagi hasil *al-Musaqah* kebun kelapa sawit yang telah mereka lakukan selama ini, agar menjadi sempurna dengan menjaga kejujuran dan kepercayaan agar pelaksanaan bagi hasil *al-Musaqah* kebun kelapa sawit ini bisa terus dilakukan dan bermanfaat untuk masa-masa yang akan datang.
2. Kepada tokoh alim ulama, cerdik pandai dan yang memahami tentang kerjasama bagi hasil yang ada di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar agar menjalin kerjasama yang baik dalam usaha untuk memberi penjelasan dan pemahaman tentang syarat-syarat dan rukun-rukun bagi hasil *al-Musaqah* serta landasan hukumnya, baik itu dari al-Qur'an maupun dari Hadits Nabi Muhammad SAW.

3. Kepada warga masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, haruslah belajar untuk memenuhi dan mencari ilmu pengetahuan agama dengan cara meminta penjelasan dari orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, semoga dapat direalisasikan didalam kehidupan sehari-hari.
4. Diharapkan kepada pihak akademisi terutama bagi perpustakaan untuk lebih menyediakan buku-buku khusus tentang kerjasama bagi hasil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafila, 2010
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Abdul Gazi, Muhammad Fu'ad, *Al-Lu'lu Wal Al-Marjan*, Semarang, Toha Putera Group, 1993, Jilid III
- Amir syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Ramawangun : Prenada Media, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : PT. Karya Toha Putra, 2009
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Haris Hardiansyah, *Metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, Ter : Abdurrahman dan Haris Abdullah, Jakarta, Pustaka Amani, 1995
- Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar (kelengkapan orang soleh)*, Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1993, Cet ke-1
- Jafri, A Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta; CV. Haji Masagung, 1994
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Al-kausar, 2001
- Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Pengembangan*, Riau: Suska Press, 2008
- Nasiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani, 2007
- Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj: Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011
- Syarifuddn, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Mukhtashar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Solo, PT Aqwam Media Profetika, 2010, Cet ke-2

Safi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001

Syafe'I Rachmad .*Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia 2001

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2007, Cet ke 40

Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997, Cet.I

Zainuddin Ahmad az-Zubaidi, terjemahan Hadis Shahih Bukhari, Semarang, PT. Karya Toha Putra Semarang, 2007, Cet ke-1